

LAPORAN KEUANGAN

**BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan terbaru dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud
dan Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah SKPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar
Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-

- bangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

- Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Banten;
 22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Banten;
 23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Banten;
 24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Banten;
 26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

Struktur Organisasi

Pada tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

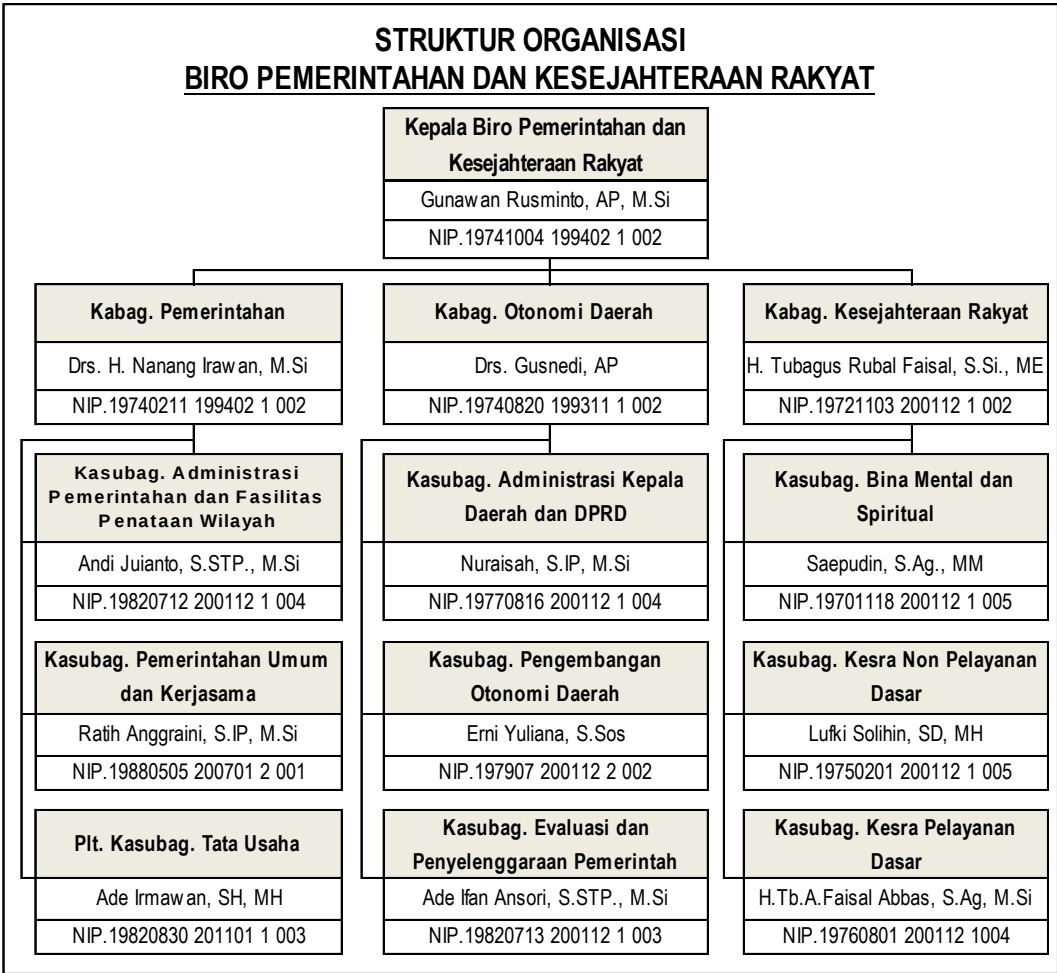
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten disebutkan bahwa susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah.
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar;
 - 3. Kepala Sub Bagian Kesra Pelayanan Dasar.

Tabel. 1.1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022



1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika
Penulisan
Calk

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

*Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja
Keuangan*

Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten berdasarkan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.42.934.451.931,- dan telah melalui perubahan atau efisiensi anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dengan efisiensi sebesar Rp.10.188.114.431,- atau berkurang 23,72% dari pagu awal menjadi Rp. 32.746.337.500,-. Anggaran dimaksud untuk membiayai 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
3. Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari ketiga program dimaksud, yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- c. Fasilitas Kerjasama Daerah.

3. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual;
- b. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
- c. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 19.679.616.913,- atau 60,10,% dari anggaran yang direncanakan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 171.940.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 71.300.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 41,47% sehingga tidak mencapai target;
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp. 45.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 44.981.480,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,96% dan over target yaitu lebih dari 80%;
3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 555.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 418.774.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 75,45% sehingga tidak mencapai target;
4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, rencana biaya sebesar Rp. 1.520.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 771.693.700,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 50,77% dan tidak mencapai target kurang dari 80%;
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 1.560.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.481.393.734,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 94,96% sehingga over target;
6. **Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**, rencana biaya sebesar Rp. 700.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 558.962.450,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 79,85% dan tidak mencapai target;
7. **Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 900.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 712.381.100,- dengan

demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 79,15% namun tetap tidak mencapai target;

8. **Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah**, rencana biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp. 1.700.000.000,- realisasi belanja sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 1.017.403.700,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 59,85% dan tidak mencapai target;
9. **Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual**, rencana biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp. 24.244.397.500,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.765.175.484,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 56,78% dan tidak mencapai target;
10. **Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**, rencana biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp. 850.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 455.961.500,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 53,64% tidak bisa mencapai target;
11. **Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**, rencana biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 381.589.765,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 76,32% dan tidak mencapai target capaian realisasi.

Berikut disajikan dalam tabel pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2022 dengan uraian setiap Sub Kegiatannya.

Tabel. 2.1. Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

KODE	Program	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA LANGSUNG	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,851,940,000.00	2,788,142,914.00	72.38
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171,940,000.00	71,300,000.00	41.47
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,740,000.00	0.00	0.00
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,200,000.00	8,300,000.00	45.60
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,000,000.00	44,981,480.00	99.96
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20,000,000.00	19,981,480.00	99.91
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555,000,000.00	418,774,000.00	75.45
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	150,000,000.00	104,231,000.00	69.49
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	325,000,000.00	298,235,000.00	91.76
4.01.01.1.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000,000.00	16,308,000.00	20.39
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,520,000,000.00	771,693,700.00	50.77
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000.00	210,443,000.00	84.18
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000.00	147,622,200.00	98.41
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	220,000,000.00	173,062,000.00	78.66
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900,000,000.00	240,566,500.00	26.73
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,560,000,000.00	1,481,393,734.00	94.96
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,560,000,000.00	1,481,393,734.00	94.96
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,300,000,000.00	2,288,747,250.00	69.36
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	700,000,000.00	558,962,450.00	79.85
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	150,000,000.00	119,366,400.00	79.58
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	100,000,000.00	78,337,000.00	78.34
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	450,000,000.00	361,259,050.00	80.28
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	900,000,000.00	712,381,100.00	79.15
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	250,000,000.00	133,089,100.00	53.24
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	250,000,000.00	193,714,000.00	77.49
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	400,000,000.00	385,578,000.00	96.39
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,700,000,000.00	1,017,403,700.00	59.85
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah	1,500,000,000.00	912,104,700.00	60.81
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	100,000,000.00	62,042,000.00	62.04
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	100,000,000.00	43,257,000.00	43.26
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	25,594,397,500.00	14,602,726,749.00	57.05
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Menta Spiritual	24,244,397,500.00	13,765,175,484.00	56.78
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6,500,000,000.00	1,284,177,000.00	19.76
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	17,744,397,500.00	12,480,998,484.00	70.34
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	850,000,000.00	455,961,500.00	53.64
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200,000,000.00	95,984,000.00	47.99
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	300,000,000.00	161,728,000.00	53.91
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	350,000,000.00	198,249,500.00	56.64
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	500,000,000.00	381,589,765.00	76.32
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000.00	154,425,906.00	77.21
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200,000,000.00	143,375,906.00	71.69
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	100,000,000.00	83,787,953.00	83.79

2.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan Kendala

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2022 sebagai suatu rencana yang memuat berbagai program kegiatan, penyerapan anggaran harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran seperti Akuntabilitas, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Transparansi Anggaran.

Pada umumnya kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebagaimana tertuang pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun sebelumnya dan secara fisik keseluruhan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat terlaksana 90%, hanya saja dalam penyerapan anggaran dari sisi keuangan hanya bisa mencapai 60,10% jauh dari target capaian realisasi disebabkan oleh berbagai faktor hambatan dan kendala seperti dalam penyelesaian administrasinya, terlebih dalam lingkungan Setda Provinsi Banten semua penyediaan UP/GU dan TU-nya harus melalui Biro Umum sebagai BP Induk menjadikan proses penyelesaian administrasi yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga pelaksanaan kegiatan sering terhambat karena keterbatasan waktu. Sementara itu dari sisi kebijakan pimpinan yang bisa atau tidaknya kegiatan bisa dilaksanakan sebagaimana jadwal perencanaan dan aturan semestinya.

Realisasi belanja program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022 sebesar 60,10% atau sebesar Rp. 19.679.616.913,- dan target capaian keuangan sebagian besar dibawah 90%. Adapun hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang capaian kinerja keuangannya hanya 41,47% dibawah 90% dikarenakan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA) tidak bisa dilaksanakan karena menggunakan system Fulboard dan tidak sesuai dengan Domlak, namun demikian hampir semua sub kegiatan dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana dan untuk Perjalanan Dinas Biasa Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk efisiensi;

2. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan realisasi sebesar 75,45% dibawah 90% dikarenakan untuk sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak banyak diserap atau dimanfaatkan oleh Pegawai Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengikuti kegiatan Pelatihan dan Pendidikan di sepanjang tahun 2022;
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan serapan anggaran di bawah 90% atau 50,77% dan hampir seluruh kegiatannya dapat dilaksanakan hanya kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Dalam Kota dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi terutama untuk Eselon 2 banyak yang difasilitasi oleh panitia penyelenggara;
4. **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** dengan realisasi 79,85% hampir mencapai 90% dan untuk semua dapat dilaksanakan sesuai target rencana pelaksanaan dan selebihnya ada sisa belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang tidak memungkinkan untuk diserap dan untuk efisiensi serta Perjalanan Dinas hanya digunakan sesuai kebutuhan;
5. **Pelaksanaan Otonomi Daerah** dengan realisasi 79,15% dibawah 90% dan hampir seluruhnya kegiatannya dapat dilaksanakan hanya saja untuk belanja perjalanan dinas dalam kota pada sub kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD menyisakan anggaran 60% karena untuk tahun 2022 hanya digunakan sesuai keperluan koordinasi dan fasilitasi saja dan selebihnya untuk efisiensi anggaran;
6. **Fasilitas Kerjasama Daerah** dengan realisasi 59,85% jauh dibawah 90% karena sampai dengan triwulan 4 (empat) masih menyisakan Kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) yang sekiranya bisa dilaksanakan pada Triwulan 2 tidak dapat dilaksanakan sehingga dialihkan menjadi Seminar MPU dan akan dilaksanakan pada tanggal 7 sd 9 Desember 2022 dengan mengundang 10 Provinsi Mitra Praja dimana Provinsi Banten menjadi Tuan Rumah, adanya selisih kontrak pada belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan tidak diserapnya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia serta belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk efisiensi;

7. **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** dengan serapan anggaran 56,78% dibawah 90% dikarenakan kegiatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) menyisakan anggaran yang cukup banyak sebab yang pada awal APBD 2022 direncanakan sebanyak 40 orang anggota sementara aturan dari Pemerintah Pusat hanya dibolehkan 15 orang saja, sedangkan untuk kegiatan Peringatan hari Besar Agama (PHBA) hanya melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW saja yang seharusnya ada 4 (empat) peringatan hari besar agama pada tahun 2022, dan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga tidak diserap karena tidak boleh ada pengadaan perlengkapan olahraga lagi untuk TA 2022 serta untuk Belanja Perjalanan Dinas pada sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual tidak dapat diserap karena salah kode rekening yang seharusnya paket meeting dengan demikian sampai akhir TA 2022 tidak bisa realisasi, sedangkan sisa anggaran sebagian dari selisih dari nilai kontrak untuk efisiensi;
8. **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** dengan serapan anggaran 53,64% dibawah 90% dikarenakan untuk belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen pada sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan salah kode rekening yang semula diperuntukan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli sehingga dari awal TA 2022 sampai dengan anggaran perubahan tidak dapat diserap;
9. **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** dengan realisasi 76,32% dibawah 90% dikarenakan untuk Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia hanya diserap untuk 8 (delapan) jam pelaksanaan dari semula yang dianggarkan 12 (dua belas) jam dan selebihnya selisih kontrak pengadaan untuk efisiensi.

BAB III**KEBIJAKAN AKUNTANSI****3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keenam kali diterapkan akuntansi berbasis akrual, dan tahun sebelum Tahun 2015 diterapkan basis kas menuju akrual.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Akuntansi

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

Penerapan Kebijakan

- a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara

lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

) untuk jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah

- kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan :
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan Kesejahteraan Rakyat berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

(01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

(02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

(05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban) dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

- a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

- 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam

pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau;
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stockopname).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
 Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan Kesejahteraan Rakyat yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
 Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan

kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (29) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (30) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (31) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (32) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (34) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

2..	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (35)Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (36)Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (37) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (38)Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (39) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (40) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (41) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (42) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (43) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (44) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (45) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- (46) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (47) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (49) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul.

- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Belanja

Belanja
Rp.
19.679.616.
913,-

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 19.679.616.913,- atau 60,10% dari anggaran belanja sebesar Rp 32.746.337.500,- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

Kode Rek	Uraian Rekening Jenis Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5=4/3	7
5	BELANJA DAERAH	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	13,066,720,587.00
5.1	BELANJA OPERASI	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	13,066,720,587.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,146,337,500.00	8,685,069,329.00	41.07	12,461,268,171.00
5.1.05	Belanja Hibah	11,600,000,000.00	10,994,547,584.00	94.78	605,452,416.00
5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00		0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	-	0.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	13,066,720,587.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	13,066,720,587.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	13,066,720,587.00

Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat TA 2022 & 2022

Kode Rek	Uraian Rekening Jenis Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=4/3	7	8=7/4
5	BELANJA DAERAH	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	17,332,301,064.00	7.17
5.1	BELANJA OPERASI	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	17,332,301,064.00	7.17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,146,337,500.00	8,685,069,329.00	41.07	4,072,430,002.00	21.81
5.1.05	Belanja Hibah	11,600,000,000.00	10,994,547,584.00	94.78	13,259,871,062.00	-19.53
5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00		0.00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	-	0.00	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	17,332,301,064.00	7.17
	SURPLUS / (DEFISIT)	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	17,332,301,064.00	7.17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	32,746,337,500.00	19,679,616,913.00	60.10	17,332,301,064.00	7.17

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan gabungan 2 (dua) biro yaitu Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat yang dibentuk akhir Tahun 2020 sehingga untuk realisasi tahun 2020 di dalam tabel merupakan gambaran gabungan realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2020.

Dalam tabel 4.2. perbandingan realisasi Belanja pada dengan TA.2021 mengalami kenaikan sebesar 21,81%, hal ini karena adanya APBD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat TA 2022 mendapat tambahan anggaran 52.92% dari TA 2021 namun demikian serpan untuk Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 kurang diserap dikarenakan terkendala oleh berbagai alasan dan aturan administrasi yang memungkinkan tidak bisa maksimal.

Sedangkan untuk Belanja Hibah dapat direalisasikan sebesar 94, 78% dari pagu anggaran yang telah disediakan bagi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang telah memenuhi persyaratan pengajuan Hibah melalui verifikasi dan sesuai dengan Peraturan Pengajuan Hibah bagi Lembaga Nirlaba.

4.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja
Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 19.679.616.913,- atau 60,10% dari anggaran sebesar Rp 32.746.337.500,-, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.17.332.301.064,- realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.347.315.849,- atau naik 13,54%, berikut rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa (Tabel 4.2).

4.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0,-, dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk Belanja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maka ditiadakan.

4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja
Barang
dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 8.685.069.329,- atau 41,07% dari anggaran sebesar Rp. 21.146.337.500,- dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.072.430.002,- realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp.4.612.639.327,- atau naik 113,36%, tetapi jika dibandingkan dengan

realisasi dari ketersediaan anggaran tahun 2022 meningkat sedikit daripada realisasi dari anggaran tahun 2021. Hal ini karena pada anggaran TA 2022 lebih besar dari TA 2021 sehingga jika dibandingkan secara persentase realisasi TA 2022 lebih kecil serapannya dengan realisasi TA 2021.

4.1.1.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah

Belanja hibah untuk Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mendapat anggaran setelah perubahan Rp.11.600.000.000,- dengan realisasi Rp.10.994.547.584,- atau 94,78% berikut rincian belanja hibah yang terealisasi dengan pengembaliannya;

Tabel. 4.3 Uraian Belanja Hibah Tahun 2022

NO	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi Berdasarkan SP2D	Penerimaan Kembali Sisa Hibah	%
1	MUI Banten	1,000,000,000.00	998,824,104.00	1,175,896.00	99.88
2	LPTQ Banten	9,500,000,000.00	8,904,726,995.00	595,273,005.00	93.73
3	BAZNAS Banten	1,000,000,000.00	990,996,485.00	9,003,515.00	99.10
4	LP3KP (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pespareni Katolik) Banten	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00
		11,600,000,000	10,994,547,584.00	605,452,416	94.78

Belanja hibah untuk sepanjang TA 2022 pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berupa Hibah Uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penyaluran hibah harus melalui verifikasi terlebih dahulu dan hanya 4 (empat) lembaga yang ada di wilayah Provinsi Banten yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hibah seperti MUI Banten, LPTQ Banten, BAZNAS Banten dan LP3KP (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pespareni Katolik) Banten.

4.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun Anggaran 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten tidak mendapat alokasi anggaran bila dibandingkan dengan TA 2021 mendapat anggaran Rp. 215.620.000,- untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa unit computer namun tidak dapat direalisasikan karena untuk pembelian barang hanya bisa di Biro Umum dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hanya mendapat dropingan saja.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Pos-pos LO Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO Realisasi Pendapatan LO pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,- karena **Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten bukan termasuk SKPD penghasil sumber pendapatan APBD** jadi dalam laporan keuangan hanya terdapat laporan belanja untuk membiayai program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten pada TA 2022.

4.2.2 Beban LO

Beban LO Realisasi Beban LO sampai dengan 31 Desember 2022 (sampai dengan laporan ini dibuat) adalah sebesar Rp. 20.080.246.092,96 sedangkan realisasi Beban Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 17.563.741.672,33 (merupakan penggabungan Beban Operasional dari Biro Pemerintahan dan Biro Kesra), dengan rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.4 Uraian Beban LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
	KEGIATAN OPERASIONAL		
8	BEBAN		
811	Beban Pegawai	0,00	0,00
81201	Beban Persediaan	669.305.500,00	487.841.950,00
81202	Beban Jasa	4.929.972.079,00	2.656.340.752,00
81203	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
81204	Beban Perjalanan Dinas	3.089.371.750,00	960.972.000,00
813	Beban Bunga	0,00	0,00
814	Beban Subsidi	0,00	0,00
815	Beban Hibah	10.994.547.584,00	13.259.871.062,00
816	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
81701	Beban Penyusutan	397.049.179,96	198.715.908,33
81702	Beban Amortisasi	0,00	0,00
81703	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
81704	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
818	Beban Transfer	0,00	0,00
819	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	20.080.246.092,96	17.563.741.672,33
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(20.080.246.092,96)	(17.563.741.672,33)

Penjelasan
n Pos-pos
Neraca

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- disajikan sebagai berikut;

4.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan
Setara
Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP, ini berarti pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten seluruh uang kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sudah dipertanggungjawabkan atau sudah disetorkan ke Kas Daerah per tanggal Neraca 31 Desember 2022. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.5 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

Keterangan :
- Terlampir Berita Acara Pemeriksaan Kas (Cash Opname) per 31 Desember 2022
- Terlampir Surat Pernyataan Bank Banten Cabang Serang bahwa Saldo Rekening Giro an.Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nomor: 0881002001 pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.00,00

4.3.1.2 Persediaan

Persediaan

Persediaan merupakan akun untuk mencatat Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah dalam waktu 12 bulan.

Adapun Persediaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten per 31 Desember 2022 yang mencakup Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Perlengkapan Dinas, Suvenir/Cendera Mata dan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya, berikut hasil

Stock Opname barang persediaan internal yang berada dalam pengurusan;

Menurut Buku:		
Perediaan Awal per 1 Januari 2022	Rp	0,-
Jumlah Penerimaan/pengadaan 1 Jan s/d per 31 Des 2022	Rp	669.305.500,-
Jumlah pengeluaran/pemakaian 1 Jan s/d per 31 Des 2022	Rp	669.305.500,-
Saldo Persediaan akhir per 31 Desember 2022	Rp	0,-
Menurut Stock Opname:		
Saldo Persediaan akhir per 31 Desember 2022	Rp	0,-
Selisih	Rp	0,-

Dengan demikian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dimana saldo akhir Persediaan telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan pengurus Barang (Terlampir : Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan /Stock Opname per 31 Desember 2022)

4.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut;

4.3.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 adalah Rp. 9.886.040.276,75. Adapun penambahan Aset Tetap (Mutasi Masuk) –Pindah Antar SKPD Tahun 2022 dari Biro Umum Setda Provinsi Banten, berdasarkan Kertas Kerja Atisisbada TA 2022 dan hasil Rekonsiliasi Aset antara Pengurus Barang Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Bagian Aset BPKAD Provinsi Banten, terdapat mutasi berjalan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sebesar Rp. 313.992.380,- berikut pencatatan atas semua mutasi masuk Aset pada Jurnal Umum Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu :

1. Mutasi Aset Masuk, jurnal:		
D. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp.	5.447.880,-
D. Alat Kantor Lainnya	Rp.	18.850.000,-
D. Meubelair	Rp.	19.520.000,-
D. Personal Komputer	Rp.	86.014.000,-
D. Peralatan Personal Komputer	Rp.	10.320.000,-
K. Mutasi Masuk		Rp. 140.151.880,-

2. Mutasi Aset Masuk, jurnal:

D. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	173.840.500,-	
K. Mutasi Masuk			Rp. 173.840.500,-

Penambahan Aset Tetap/Barang Inventaris adalah Mutasi masuk - pindah anatar SKPD dari Biro Umum Setda Provinsi Banten. (sumber: Berita Acara Rekonsiliasi (Verifikasi) Neraca Aset TA.2022

4.3.2.2. Aset Tetap Lainnya

Aset
Tetap
Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 700.000.000,- berupa Peta Lokasi inventaris dari Biro Pemerintahan sejak APBD Tahun 2013 pada Kegiatan Pengadaan data dan informasi pendukung pemekaran Daerah.

4.3.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset
Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 9.380.408.501,63,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 terdapat di Kertas Kerja Aset dan Rekap Penyusutan Aset Tetap.

4.3.3. Aset Lainnya

Aset
Lainnya

Saldo Aset Lain-lain Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 265.150.000,- yang terdiri dari Aset Lain lain-lainnya Rp.265.150.000,- dan adanya penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp.211.000.000,- dari Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, sehingga perlu dibuatkan Jurnal Umum Penyesuaian terhadap transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut;

Penghapusan Aset Lainnya;

D. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	Rp.	211.000.000,-	
K. Aset Lain- Lainnya			Rp. 211.000.000,-

Untuk rincian Aset lain-lain yang berupa penghapusan Aset Rusak Berat/Usang dari Reklas kredit (sumber Kertas Kerja) dari Reklas tahun lalu;

Tabel.4.6. Mutasi Masuk Aset Lain-lain pada Tahun 2021

No.	Tanggal/ ID Transaksi	Uraian	KD Rekap	Debet		Kredit		Saldo		Barang			
				Juml ah	Harga	Jumlah	Harga	Jum lah	Harga	ID Barang/ ID Awal	KD SKPD/ Nama SKPD	KD Barang/ Nama Barang	Tahun Perolehan/ No. Reg.
1	20-05-2021/	Reklas Aset Lain-lain #4645675	01.02.05	1	85.000.000,00			1	85.000.000,00	14888/ 14888	4.01.01.0002.001/ Sekretariat Daerah	1.3.2.02.01.01.004/ Multi Purpose Vehicle (MPV)	2002/ 000008
2	20-05-2021/	Reklas Aset Lain-lain #4645676	01.02.05	1	126.000.000,00			1	126.000.000,00	14889/ 14889	4.01.01.0002.001/ Sekretariat Daerah	1.3.2.02.01.01.004/ Multi Purpose Vehicle (MPV)	2002/ 000009
Total				2	211.000.000,00	0	0,00	2	211.000.000,00				

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset lainnya diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

4.3.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) pada Neraca Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp.265.150.000,- yang berupa Jasa Konsultasi, Software Aplikasi Penyusunan Database Hibah dan Software Aplikasi Hibah yang merupakan bawaan dari Biro Kesejahteraan rakyat (*Sumber data BA Rekonsiliasi (Verifikasi) Neraca Aset Tahun 2022*) berikut rincian Aset Tak Berwujud;

Tabel.4.7. Aset Tak Berwujud Tahun 2022

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Judul	Cara Perolehan / Sumber Dana / Status Barang / Kondisi / Penggunaan	Harga	Tgl. Buku/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Penerimaan/ Status Aset	Ket.
1	Software	2015	JASA KONSULTASI OPERASIONALISASI HIBAH BANSOS ONLINE	Pembelian BW / - /Inventaris/ Baik/ -	166,700,000.00	31-12-2015/ / 15-12-2015/ / Aset Tidak Berwujud	KODE REKENING : 5.2.2.24.02 JASA KONSULTASI OPERASIONALISASI HIBAH BANSOS ONLINE/
2	Software	2013	Software Aplikasi Penyusunan Database Hibah dan Bansos	Pembelian BW / - /Inventaris/ Baik/ -	49,200,000.00	31-12-2013/ / 31-12-2013/ / Aset Tidak Berwujud	Software Aplikasi Penyusunan Database Hibah dan Bansos/
3	Software	2011	Software Aplikasi Hibah	Pembelian BW / - /Inventaris/ Baik/ -	49,250,000.00	31-12-2011/ / 31-12-2011/ / Aset Tidak Berwujud	Software Aplikasi Hibah/
Jumlah Harga					265.150.000,00		

Kartu Inventaris Barang Aset Tak Berwujud Atisibada

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

4.3.3.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo amortisasi aset tak berwujud (ATB) pada Neraca Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 265.150.000,- dengan rincian berikut ini;

Tabel.4.8. Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Harga Perolehan (Tanpa Pemeliharaan Ekstra & Non Kapital)	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Masa Manfaat/ Sisa Masa Manfaat/ Akhir Tahun
1	Software	2015	Baik	166,700,000.00	166.700.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2019
2	Software	2013	Baik	49,200,000.00	49.200.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2017
3	Software	2011	Baik	49,250,000.00	49.250.000,00	0,00	0,00	4 thn/ 0 bulan/ 2015
Jumlah Harga				265.150.000,00	265.150.000,00	0,00	0,00	

Sumber: Buku Inventaris Barang (Amortisasi Penyusutan Aset Tak Berwujud) Tahun 2022

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.

4.3.4 Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pada Neraca Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dikarenakan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tidak terdapat kewajiban/utang pihak Ketiga seperti tagihan PLN, PDAM dan Telkom yang semuanya itu dikelola dan difasilitasi oleh Biro Umum Setda Provinsi Banten.

Sementara untuk jenis kewajiban lain Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga tidak memiliki Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.5 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.205.631.775,13 dan Rp. 1.288.688.575,09. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Pos-pos
Laporan
Perubahan
Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan;

Tabel 4.9 Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	1.288.688.575,09	1.452.789.983,64
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(20.080.246.092,96)	(17.563.741.672,33)
3	R/K PPKD	19.679.616.913,00	17.332.301.064,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	317.572.380,00	67.339.199,78
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	0,00	(363.159.250,22)
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	317.572.380,00	430.498.450,00
	EKUITAS AKHIR	1.205.631.775,13	1.288.688.575,09

Ekuitas
Awal

4.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 1.288.688.575,09 nilai ekuitas awal tersebut telah sesuai dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021.

Surplus
Defisit LO

4.4.2 Surplus Defisit LO

Untuk surplus defisit LO Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 20.080.246.092,96 Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, sementara defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4.4.3 R/K PPKD

R/K PPKD

R/K PPKD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022 Rp. 19.679.616.913,-, R/K PPKD adalah Rencana Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau belanja.

4.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp 0,-
- b. Koreksi Aset (Aset Tetap dan Persediaan) sebesar Rp. 0,-
- c. Koreksi Kewajiban sebesar Rp 0,-
- d. Lain-lain Rp 317.572.380,-

Mutasi Masuk Persediaan -Jurnal Penyesuaian Dropping Persediaan dari Biro Umum Bahan Komputer.

BAB V**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Sekretariat Daerah Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Serang. Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan Perda tersebut Sekretariat daerah Provinsi Banten mempunyai 3 (tiga) Asisten Daerah yaitu: (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Asisten Pembangunan dan Perekonomian; dan (3) Asisten Administrasi Umum.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Daerah. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada di bawah Asisten Pemerintahan.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidangnya.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa kedudukan dari Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membantu Asisten Pemerintahan untuk melaksanakan

pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan, otonomi daerah dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan daerah, otonomi daerah dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tugas dan fungsi pemerintahan pun dinamis, begitu pun dengan dinamika kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dimana dimensi sosial, penanggulangan kemiskinan ada di dalamnya dan mempunyai kedekatan langsung dengan visi kemandirian dan kesejahteraan sesuai Visi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Penjabaran makna Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang harus diimplementasikan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten adalah secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB VI

PENUTUP

Penutup Demikian uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.



PROVINSI BANTENNERACA
SKPD

PER : 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
122	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	9.886.040.276,75	9.572.047.896,75	313.992.380,00	3,28
133	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(9.380.408.501,63)	(8.983.359.321,67)	(397.049.179,96)	4,42
JUMLAH ASET TETAP		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA				
153	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	265.150.000,00	476.150.000,00	(211.000.000,00)	(44,31)
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(265.150.000,00)	(476.150.000,00)	211.000.000,00	(44,31)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00	0,00	0,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
JUMLAH EKUITAS		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
197410041994021002



PROVINSI BANTEN
NERACA SALDO SKPD
PER : 31 DESEMBER 2022

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	19.679.616.913,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.963.277.350,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.482.467.100,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	208.644.887,00	0,00
1.3.02.02.01.0007	Kendaraan Tempur	15.080.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	20.087.082,36	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	22.015.143,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.972.574,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	72.239.956,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	239.426.410,05	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	88.530.467,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	426.747.119,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	17.371.843,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	209.645.192,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.325.739,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	642.201.845,01	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	17.793.157,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	75.922.960,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	18.886.260,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	24.931.660,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	78.056.579,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	142.044.630,00	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	41.758.567,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	157.292.728,00	0,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.356.845,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	1.180.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	100.616.572,00	0,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	15.524.267,00	0,00
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel	17.685.859,89	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.158.473.670,44	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	3.317.500,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	302.692.995,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	38.548.319,00	0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.925.000,00	0,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	700.000.000,00	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.013.109.750,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(4.113.041.783,34)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(208.644.887,00)	0,00
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(15.080.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(91.451.223,68)	0,00
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(2.485.350,00)	0,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(13.696.182,37)	0,00
1.3.07.01.04.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan	(2.130.300,00)	0,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(22.015.143,00)	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(2.972.574,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(72.239.956,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(216.932.638,83)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(334.235.785,67)	0,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(185.591.727,64)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(15.010.593,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(118.193.968,24)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(202.333.414,98)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(642.201.845,01)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(17.793.157,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(75.922.960,00)	0,00
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(18.886.260,00)	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(24.931.660,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(78.056.579,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(142.044.630,00)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(48.023.491,06)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(200.841.802,00)	0,00
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(2.312.593,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(5.753.333,34)	0,00
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(9.284.704,00)	0,00
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	9.284.704,00	0,00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(100.616.572,00)	0,00
1.3.07.01.08.0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	(2.361.250,00)	0,00
1.3.07.01.08.0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan	(15.524.267,00)	0,00
1.3.07.01.09.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian	(6.682.150,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.045.119.503,78)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(3.317.500,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(151.746.551,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(131.858.800,69)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(37.248.319,00)	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	265.150.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	(265.150.000,00)	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	211.000.000,00	0,00
1.5.04.01.01.0008	Aset Lain-lain - Lainnya	54.150.000,00	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat / Usang	(211.000.000,00)	0,00
1.5.06.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	(54.150.000,00)	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.03.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
2.1.01.04.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	0,00	1.288.688.575,08
3.1.01.01.02.0023	Mutasi Masuk	0,00	143.731.880,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	19.679.616.913,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.092.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.870.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	97.253.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	483.923.445,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.124.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	39.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	121.695.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	41.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	670.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.298.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	131.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.341.784,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.115.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.896.550,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	78.021.900,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	95.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.600.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.074.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	882.114.650,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	905.767.100,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.066.850.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.640.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.162.500.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.994.547.584,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.092.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.870.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.010.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.833.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.630.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.010.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.460.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	483.923.445,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.800.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.124.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	39.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	121.695.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	41.580.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	670.700.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.298.050.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	131.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.341.784,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.115.400,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.896.550,00	0,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	78.021.900,00	0,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	95.000.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.600.000,00	0,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.074.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	882.114.650,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	905.767.100,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.066.850.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.640.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.162.500.000,00	0,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.994.547.584,00	0,00
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	109.345.000,00	0,00
8.2.01.03.03.0007	Beban Penyusutan Universal Tester	1.256.666,66	0,00
8.2.01.04.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.130.300,00	0,00
8.2.01.05.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.177.421,67	0,00
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	3.411.550,00	0,00
8.2.01.05.02.0001	Beban Penyusutan Mebel	2.369.166,64	0,00
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.669.000,00	0,00
8.2.01.06.01.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.237.500,00	0,00
8.2.01.09.02.0002	Beban Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	3.341.075,00	0,00
8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	67.005.999,99	0,00
8.2.01.10.02.0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	21.265.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
	JUMLAH	40.791.654.281,08	40.791.654.281,08

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
197410041994021002



PROVINSI BANTEN
NERACA SALDO SKPD
PER : 31 DESEMBER 2022

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	19.679.616.913,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.963.277.350,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.482.467.100,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	208.644.887,00	0,00
1.3.02.02.01.0007	Kendaraan Tempur	15.080.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	20.087.082,36	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	22.015.143,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.972.574,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	72.239.956,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	239.426.410,05	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	88.530.467,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	426.747.119,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	17.371.843,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	209.645.192,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.325.739,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	642.201.845,01	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	17.793.157,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	75.922.960,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	18.886.260,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	24.931.660,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	78.056.579,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	142.044.630,00	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	41.758.567,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	157.292.728,00	0,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.356.845,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	1.180.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	100.616.572,00	0,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	15.524.267,00	0,00
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel	17.685.859,89	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.158.473.670,44	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	3.317.500,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	302.692.995,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	38.548.319,00	0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.925.000,00	0,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	700.000.000,00	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.013.109.750,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(4.113.041.783,34)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(208.644.887,00)	0,00
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(15.080.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(91.451.223,68)	0,00
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(2.485.350,00)	0,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(13.696.182,37)	0,00
1.3.07.01.04.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan	(2.130.300,00)	0,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(22.015.143,00)	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(2.972.574,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(72.239.956,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(216.932.638,83)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(334.235.785,67)	0,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(185.591.727,64)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(15.010.593,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(118.193.968,24)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(202.333.414,98)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(642.201.845,01)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(17.793.157,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(75.922.960,00)	0,00
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(18.886.260,00)	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(24.931.660,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(78.056.579,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(142.044.630,00)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(48.023.491,06)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(200.841.802,00)	0,00
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(2.312.593,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(5.753.333,34)	0,00
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(9.284.704,00)	0,00
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	9.284.704,00	0,00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(100.616.572,00)	0,00
1.3.07.01.08.0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	(2.361.250,00)	0,00
1.3.07.01.08.0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan	(15.524.267,00)	0,00
1.3.07.01.09.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian	(6.682.150,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.045.119.503,78)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(3.317.500,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(151.746.551,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(131.858.800,69)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(37.248.319,00)	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	265.150.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	(265.150.000,00)	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	211.000.000,00	0,00
1.5.04.01.01.0008	Aset Lain-lain - Lainnya	54.150.000,00	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat / Usang	(211.000.000,00)	0,00
1.5.06.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	(54.150.000,00)	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.03.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
2.1.01.04.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	0,00	1.288.688.575,08
3.1.01.01.02.0023	Mutasi Masuk	0,00	143.731.880,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	19.679.616.913,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.092.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.870.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	97.253.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	483.923.445,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.124.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	39.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	121.695.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	41.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	670.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.298.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	131.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.341.784,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.115.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.896.550,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	78.021.900,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	95.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.600.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.074.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	882.114.650,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	905.767.100,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.066.850.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.640.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.162.500.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.994.547.584,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.092.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.870.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.010.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.833.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.630.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.010.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.460.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	483.923.445,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.800.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.124.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	39.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	121.695.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	41.580.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	670.700.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.298.050.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	131.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.341.784,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.115.400,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.896.550,00	0,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	78.021.900,00	0,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	95.000.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.600.000,00	0,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.074.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	882.114.650,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	905.767.100,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.066.850.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.640.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.162.500.000,00	0,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.994.547.584,00	0,00
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	109.345.000,00	0,00
8.2.01.03.03.0007	Beban Penyusutan Universal Tester	1.256.666,66	0,00
8.2.01.04.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.130.300,00	0,00
8.2.01.05.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.177.421,67	0,00
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	3.411.550,00	0,00
8.2.01.05.02.0001	Beban Penyusutan Mebel	2.369.166,64	0,00
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.669.000,00	0,00
8.2.01.06.01.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.237.500,00	0,00
8.2.01.09.02.0002	Beban Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	3.341.075,00	0,00
8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	67.005.999,99	0,00
8.2.01.10.02.0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	21.265.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
	JUMLAH	40.791.654.281,08	40.791.654.281,08

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
197410041994021002



PROVINSI BANTENNERACA
SKPD

PER : 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
122	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	9.886.040.276,75	9.572.047.896,75	313.992.380,00	3,28
133	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(9.380.408.501,63)	(8.983.359.321,67)	(397.049.179,96)	4,42
JUMLAH ASET TETAP		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA				
153	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	265.150.000,00	476.150.000,00	(211.000.000,00)	(44,31)
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(265.150.000,00)	(476.150.000,00)	211.000.000,00	(44,31)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00	0,00	0,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)
JUMLAH EKUITAS		1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.205.631.775,12	1.288.688.575,08	(83.056.799,96)	(6,45)

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
197410041994021002



PROVINSI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PERIODE : 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

HAL: 1 / 2

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00
721	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00
72101	Bagi Hasil Pajak -LO	0,00	0,00
72102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LO	0,00	0,00
72103	Dana Alokasi Umum (DAU) -LO	0,00	0,00
72104	Dana Alokasi Khusus (DAK) -LO	0,00	0,00
722	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0,00	0,00
72201	Dana Penyesuaian - LO	0,00	0,00
72202	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00
72203	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
731	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00
732	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
733	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
8	BEBAN		
811	Beban Pegawai	0,00	0,00
81201	Beban Persediaan	669.305.500,00	487.841.950,00
81202	Beban Jasa	4.929.972.079,00	2.656.340.752,00
81203	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
81204	Beban Perjalanan Dinas	3.089.371.750,00	960.972.000,00
813	Beban Bunga	0,00	0,00
814	Beban Subsidi	0,00	0,00
815	Beban Hibah	10.994.547.584,00	13.259.871.062,00
816	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
81701	Beban Penyusutan	223.208.679,96	198.715.908,33
81702	Beban Amortisasi	0,00	0,00
81703	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
81704	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
818	Beban Transfer	0,00	0,00
819	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	19.906.405.592,96	17.563.741.672,33
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(19.906.405.592,96)	(17.563.741.672,33)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
741	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SIMRAL

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
743	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
832	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19.906.405.592,96)	(17.563.741.672,33)
	POS LUAR BIASA		
751	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
841	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(19.906.405.592,96)	(17.563.741.672,33)

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si¹
NIP. 197410041994021002



PROVINSI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PERIODE : 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

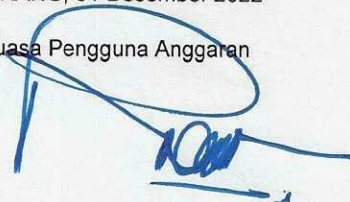
HAL: 1 / 2

No	Uraian	2022
1	2	3
	KEGIATAN OPERASIONAL	
8	BEBAN	
81201	Beban Persediaan	669.305.500,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.092.500,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.870.000,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.010.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.833.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.630.000,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.400.000,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.010.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.460.000,00
81202	Beban Jasa	4.929.972.079,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	483.923.445,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.500.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.800.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.124.000,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	39.400.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	121.695.000,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	41.580.000,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	670.700.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.298.050.000,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	131.000.000,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.341.764,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.115.400,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.896.550,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00
8.1.02.02.04.0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	78.021.900,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	95.000.000,00

No	Uraian	2022
1	2	3
8.1.02.02.09.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.600.000,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.074.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.162.500.000,00
81204	Beban Perjalanan Dinas	3.089.371.750,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	882.114.650,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	905.767.100,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.066.850.000,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.640.000,00
815	Beban Hibah	10.994.547.584,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.994.547.584,00
81701	Beban Penyusutan	223.208.679,96
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	109.345.000,00
8.2.01.03.03.0007	Beban Penyusutan Universal Tester	1.256.666,66
8.2.01.04.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.130.300,00
8.2.01.05.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.177.421,67
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	3.411.550,00
8.2.01.05.02.0001	Beban Penyusutan Mebel	2.369.166,64
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.669.000,00
8.2.01.06.01.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.237.500,00
8.2.01.09.02.0002	Beban Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	3.341.075,00
8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	67.005.999,99
8.2.01.10.02.0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	21.265.000,00
	JUMLAH BEBAN	19.906.405.592,96
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(19.906.405.592,96)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(19.906.405.592,96)

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 197410041994021002



PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER REKENING SUB RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

SATKER : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	32.746.337.500,00	19.679.616.913,00	(13.066.720.587,00)	60,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.146.337.500,00	8.685.069.329,00	(12.461.268.171,00)	41,07
5.1.02.01	Belanja Barang	3.096.062.300,00	1.474.947.945,00	(1.621.114.355,00)	47,64
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.096.062.300,00	1.474.947.945,00	(1.621.114.355,00)	47,64
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	635.601.300,00	429.092.500,00	(206.508.800,00)	67,51
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.930.000,00	45.870.000,00	(1.060.000,00)	97,74
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	113.903.000,00	97.253.000,00	(16.650.000,00)	85,38
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	31.180.000,00	13.630.000,00	(17.550.000,00)	43,71
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.700.000,00	1.400.000,00	(18.300.000,00)	7,11
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	168.000.000,00	0,00	(168.000.000,00)	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.800.000,00	45.010.000,00	(14.790.000,00)	75,27
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	105.775.000,00	26.460.000,00	(79.315.000,00)	25,02
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.305.000,00	0,00	(19.305.000,00)	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	991.820.000,00	483.923.445,00	(507.896.555,00)	48,79
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	410.680.000,00	36.500.000,00	(374.180.000,00)	8,89
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.100.000,00	78.800.000,00	(1.300.000,00)	98,38
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.092.000,00	3.124.000,00	(23.968.000,00)	11,53
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	88.816.000,00	0,00	(88.816.000,00)	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	40.050.000,00	39.400.000,00	(650.000,00)	98,38
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	200.100.000,00	121.695.000,00	(78.405.000,00)	60,82
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	46.000.000,00	41.580.000,00	(4.420.000,00)	90,39

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.112.419.200,00	2.958.249.634,00	(4.154.169.566,00)	41,59
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.307.750.000,00	2.620.200.000,00	(3.687.550.000,00)	41,54
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.710.150.000,00	670.700.000,00	(1.039.450.000,00)	39,22
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131.510.000,00	74.480.000,00	(57.030.000,00)	56,63
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00	10.000.000,00	(38.000.000,00)	20,83
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.305.850.000,00	1.298.050.000,00	(7.800.000,00)	99,40
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	507.970.000,00	37.500.000,00	(470.470.000,00)	7,38
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.180.300.000,00	131.000.000,00	(2.049.300.000,00)	6,01
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	100.063.200,00	29.353.734,00	(70.709.466,00)	29,34
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.000.000,00	22.341.784,00	(70.658.216,00)	24,02
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.139.200,00	3.115.400,00	(23.800,00)	99,24
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.924.000,00	3.896.550,00	(27.450,00)	99,30
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	265.820.000,00	78.000.000,00	(187.820.000,00)	29,34
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	32.580.000,00	12.500.000,00	(20.080.000,00)	38,37
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	82.980.000,00	0,00	(82.980.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	49.760.000,00	0,00	(49.760.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	7.000.000,00	(35.000.000,00)	16,67
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	363.786.000,00	215.621.900,00	(148.164.100,00)	59,27
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	98.000.000,00	78.021.900,00	(19.978.100,00)	79,61
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	167.786.000,00	95.000.000,00	(72.786.000,00)	56,62
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	98.000.000,00	42.600.000,00	(55.400.000,00)	43,47
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	15.074.000,00	(59.926.000,00)	20,10
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	15.074.000,00	(59.926.000,00)	20,10
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.187.856.000,00	3.089.371.750,00	(4.098.484.250,00)	42,98

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.187.856.000,00	3.089.371.750,00	(4.098.484.250,00)	42,98
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.026.068.000,00	882.114.650,00	(1.143.953.350,00)	43,54
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.659.710.000,00	905.767.100,00	(1.753.942.900,00)	34,06
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.245.578.000,00	1.066.850.000,00	(1.178.728.000,00)	47,51
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	256.500.000,00	234.640.000,00	(21.860.000,00)	91,48
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	(2.587.500.000,00)	31,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	(2.587.500.000,00)	31,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	(2.587.500.000,00)	31,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.600.000.000,00	10.994.547.584,00	(605.452.416,00)	94,78
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.600.000.000,00	10.994.547.584,00	(605.452.416,00)	94,78
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.600.000.000,00	10.994.547.584,00	(605.452.416,00)	94,78
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.600.000.000,00	10.994.547.584,00	(605.452.416,00)	94,78
	JUMLAH BELANJA DAERAH	32.746.337.500,00	19.679.616.913,00	(13.066.720.587,00)	60,10
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.746.337.500,00)	(19.679.616.913,00)	13.066.720.587,00	60,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(32.746.337.500,00)	(19.679.616.913,00)	13.066.720.587,00	60,10

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

NIP. 197410041994021002



**LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya**

**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Banten**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Tahun 2022

Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), serta perangkat-perangkat perundang-undangan lainnya merupakan titik tolak pelaksanaan pengelolaan serta penata usahaan keuangan di daerah. Salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan serta penata usahaan keuangan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang bersifat temporer maupun periodik disajikan dengan berpedoman kepada standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005).

Namun demikian, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman dan multi tafsir yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara pembaca. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dan multi tafsir tersebut, OPD sebagai entitas akuntansi menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi tentang kondisi dan posisi keuangan selama satu tahun anggaran sehingga dapat membantu serta memudahkan penggunaan dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dengan demikian catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Ringkasan Laporan Realisasi

Ringkasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Tahun 2022 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Tahun 2022 ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan laporan Realisasi Semester Pertama dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama semester pertama pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkap informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan Realisasi.

1.2. Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Kegiatan dan Perincian Obyek Rekening

Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Kegiatan dan Perincian Obyek Rekening, disajikan pada lembar lampiran-lampiran berikutnya yang terdiri dari rincian obyek perkegiatan yang sudah dilaksanakan dalam semester pertama yang tercatat dalam laporan SIMRAL.

1.3. Catatan atas Penjelasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis

Atas laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis yang berisikan Penjelasan Secara Umum tentang laporan dimaksud serta alasan-alasan terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dapat dilihat dalam penjelasan realisasi yang akan di tampilkan dalam lampiran-lampiran yang disediakan atas dasar pencatatan di laporan SIMRAL.

Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provisi Banten terdiri dari Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Tahun 2022 dan disertai Catatan rincian obyek per kode rekening yang disusun secara sentralisasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Laporan Realisasi ini mencakup seluruh transaksi Realisasi pada semester pertama yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provisi Banten yang berasal dari Dana APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara keseluruhan Pagu Anggaran Belanja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 42.934.541.931,- (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan Realisasi Anggaran yang terserap pada semester pertama sebesar Rp. 7.623.082.016,-. Anggaran belanja tersebut teralokasikan untuk Belanja Langsung pada 11 (sebelas) kegiatan.

BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terikat pada tujuan, sasaran program dan menggambarkan capaian hasil;
2. harus dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan;
3. diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas;
4. dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.934.541.931,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Anggaran dimaksud untuk membiayai 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
3. Program Kesejahteraan Rakyat

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari ketiga program dimaksud, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah;

c. Fasilitasi Kerjasama Daerah

3. Program Kesejahteraan Rakyat

a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;

b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;

c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan 3 (Tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun Pagu Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat awal tahun 2022 adalah sebesar Rp. 42.934.541.931,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan sampai dengan akhir Juni 2022 tidak ada *refocusing* atau relokasi APBD seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 Pemerintah Pusat fokus mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural.

Kebijakan Provinsi Banten Tahun 2022 bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu melanjutkan upaya pengendalian Covid 19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan; memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas dan berdaya saing; melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah serta melanjutkan reformasi penganggaran untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Kasus harian di Provinsi Banten memasuki bulan Februari 2022 mencapai lebih dari dua ribu kasus sepanjang bulan Januari 2022 kasus harian masih di bawah dua ribuan. Puncak penambahan kasus harian di Banten pada tanggal 12 Februari 2022 dengan mencapai 7.283 kasus baru, namun tingkat kesembuhan harian di bulan yang sama juga memperlihatkan kabar yang menggembirakan dengan semakin banyak pasien yang kembali sehat, tingkat vaksinasi di Provinsi Banten juga

sudah memadai sesuai hasil asesmen situasi Covid 19 dimana capaian vaksinasi I mencapai 91,99%, dan vaksin II 70,17% serta vaksin III (*booster*) 9,6%.

Namun demikian realisasi Belanja Kegiatan/Langsung Provinsi Banten TA 2022 sampai dengan Februari 2022 sebesar 7,25% dari pagu anggaran sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama TA 2021 yang mencapai 7,5%. Belanja Kegiatan/Langsung terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Kegiatan/Langsung dan program untuk pengadaan belanja modal, serta penyaluran bansos seperti BLT Dana Desa dan kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik sejalan dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan ekstrem dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Sedangkan realisasi Belanja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Semester I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.623.082.016,- atau 17,76% dari anggaran yang direncanakan di APBD sebesar Rp. 42.934.541.931,- dan lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 7,38%.

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten berdasarkan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; rencana biaya pada APBD sebesar Rp. 171.940.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.460.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 8,99%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, rencana biaya sebesar Rp 45.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.078.250,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 15,73%;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, rencana biaya sebesar Rp. 555.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 186.240.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 33,56%;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, rencana biaya sebesar Rp. 1.520.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 210.194.500,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 13,83%;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, rencana biaya pada APBD sebesar Rp 1.560.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 780.518.766,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 50,03%;
6. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, rencana biaya sebesar Rp. 700.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 115.817.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 16,55%;
7. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, rencana biaya sebesar Rp.900.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 211.483.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 23,50%;
8. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, rencana biaya sebesar Rp.1.700.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir Juni Tahun 2022 sebesar Rp. 225.888.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 13,29%;
9. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, rencana biaya sebesar Rp. 34.632.601.931,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.808.914.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 16,77%;
10. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, rencana biaya sebesar Rp. 650.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 37.968.500,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 5,84%;
11. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, rencana biaya sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 23.520.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 4,70%.

Dari uraian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, capaian kinerja keuangan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Semester 1

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6 = 3 – 4	7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171,940,000.00	15,460,000.00	8.99	156,480,000.00	91.01
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,000,000.00	7,078,250.00	15.73	37,921,750.00	84.27
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555,000,000.00	186,240,000.00	33.56	368,760,000.00	66.44
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,520,000,000.00	210,194,500.00	13.83	1,309,805,500.00	86.17
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,560,000,000.00	780,518,766.00	50.03	779,481,234.00	49.97
6	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	700,000,000.00	115,817,000.00	16.55	584,183,000.00	83.45
7	Pelaksanaan Otonomi Daerah	900,000,000.00	211,483,000.00	23.50	688,517,000.00	76.50
8	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,700,000,000.00	225,888,000.00	13.29	1,474,112,000.00	86.71
9	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	34,632,601,931.00	5,808,914,000.00	16.77	28,823,687,931.00	83.23
10	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	650,000,000.00	37,968,500.00	5.84	612,031,500.00	94.16
11	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar	500,000,000.00	23,520,000.00	4.70	476,480,000.00	95.30
Jumlah		42,934,541,931.00	7,623,082,016.00	17.76	35,311,459,915.00	82.24

Sumber : diolah dari Laporan Akuntansi SIMRAL Keuangan Semester I TA.2022

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target kinerja Semester I (Triwulan II) Tahun Anggaran 2022 pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan hambatan dan kendala seperti berikut ini;

- a. Pelaksanaan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sebagian ditunda bahkan dibatalkan dikarenakan Pemerintah Provinsi Banten harus kembali melakukan pergeseran anggaran atau refocusing untuk menangani Pandemi Covid 19 dan dampaknya serta menyukseskan program vaksinasi Covid 19 di Provinsi Banten yang dilaksanakan dari awal tahun 2022 sehingga belanja hibah yang telah direncanakan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdampak tidak memungkinkan untuk dilakukan pada tahun ini;

- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dilaksanakan dalam penanganan pandemi Covid 19 juga memberikan dampak tidak dapat dilaksanakannya bahkan membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang atau peserta, sedangkan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah merencanakan belanja langsung dengan kegiatan yang bersifat regional keagamaan dan belanja hibah yang direncanakan bisa menjangkau seluruh wilayah Provinsi Banten dipastikan dibatalkan;
- c. Hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari pertengahan bulan Mei 2022 mengalami peningkatan kasus pasien Covid 19 dan menjadikan Provinsi Banten masuk dalam Zona Oranye sehingga penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Home bagi ASN sebesar 10-25% mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Strategi pemecahan masalah yang dilakukan sehingga hambatan dan kendala tersebut tidak menghambat dalam pencapaian target urusan umum Pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai berikut;

- a. Melalui APBN, pemerintah bekerja keras menahan dampak pandemi dan berupaya agar pemulihan ekonomi terus diakselerasi, salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kerja keras APBN berperan mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan percepatan vaksinasi dengan tetap mewaspadaai resiko Covid 19, untuk itu pemerintah terus menjalankan berbagai program antara lain berupa bantuan, relaksasi, hingga insentif untuk masyarakat maupun dunia usaha yang berdaya;
- b. Percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program pembangunan dengan tetap memperhatikan belanja yang berkualitas dan perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi masalah, tingkat resiko, serta tingkat kesulitan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Provinsi Banten;
- c. Sesuai arahan instruksi dari Gubernur Banten untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mengawasi disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya demi mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 serta menjaga kualitas pekerjaan dan tertib administrasi;

- d. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dilaksanakan dalam penanganan pandemi Covid 19 mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya bahkan membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang atau peserta, berakibat dilaksanakan koordinasi dan evaluasi serta monitoring dengan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Whatsapp untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinasi sehingga dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan memungkinkannya pelaksanaan acara Keagamaan yang biasanya dilaksanakan melibatkan ribuan orang pada tahun 2022 ini dibatasi tidak lebih dari 100 orang dalam pelaksanaannya seperti Peringatan Idul Fitri dan Idul Adha 1442H dengan Penerapan Protokol Kesehatan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan dan life skill serta mengikutsertakan pelatihan dan diklat teknis khusus atau tertentu bagi pegawai yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Semester I (Triwulan II) Tahun Anggaran 2022 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.934.541.931,- dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program yang terbagi dalam 11 (sebelas) Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Hibah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dengan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran & Pelaporan) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD, dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Banten yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas

daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan oleh kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Secara garis besar belanja daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja untuk gaji pegawai dan tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang membiayai program dan kegiatan di lingkungan SKPD.

Belanja Langsung

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten mempunyai belanja untuk membiayai belanja langsung, terdiri atas:

5.1.1. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai ada 2 kategori, yaitu untuk (a) Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung untuk membayar gaji, tunjangan dan uang kinerja bagi pegawai pegawai tapi khusus Sekretariat Daerah Provinsi Banten, anggaran gaji pegawai berada pada Biro Umum Setda Provinsi Banten, (b) Belanja Pegawai pada pos Belanja Langsung untuk membiayai kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat.

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Biro Kesejahteraan Rakyat yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.298.061.750,- yang digunakan untuk membiayai 11 (sebelas) kegiatan.

Pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2022 (30 Juni 2022) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.023.082.016,- atau sebesar 14,89% dari total alokasi Belanja Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tabel Belanja Langsung

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Serapan
1	2	3	4	5 = 6 - 3	6 = 4/3
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	42,934,541,931.00	7,623,082,016.00	35,311,459,915.00	17.76
5.102	Belanja Barang dan Jasa	20,298,061,750.00	3,023,082,016.00	17,274,979,734.00	14.89
5.105	Belanja Hibah	22,636,480,181.00	4,600,000,000.00	18,036,480,181.00	20.32
	JUMLAH BELANJA DAERAH	42,934,541,931.00	7,623,082,016.00	35,311,459,915.00	17.76

Sumber : diolah dari Laporan Akuntansi SIMRAL Keuangan Semester I TA.2022

5.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat Belanja Modal karena tidak perlu adanya pengadaan belanja modal.

5.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Hibah mengalokasikan dana sebesar Rp. 22.636.480.181,- bagi Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum seperti Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2022 adalah Rp. 4.600.000.000,- atau 20,32% dari anggaran.

5.2. Penjelasan atas Laporan Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

Realisasi anggaran belanja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten pada periode Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 7.623.082.016- atau 17,76% dari pagu anggaran pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

Prognosis Belanja dicatat berdasarkan sisa anggaran setelah dikurangkan:

- a. Sisa kontrak atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah direalisasikan sampai dengan semester pertama;
- b. Kegiatan atau anggaran yang direncanakan dilakukan/diserap pada semester pertama maupun semester kedua tetapi dengan alasan-alasan tertentu, tidak jadi atau tidak akan dilaksanakan/diserap.

Pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis per kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, rencana biaya pada APBD sebesar Rp. 171.940.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.460.000,- dengan sisa anggaran semester I TA 2022 yaitu Rp.156.480.000,-
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 156.480.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 setelah dikurangi sisa kontrak atas pekerjaan yang sudah direalisasikan sampai dengan semester pertama, sebagai berikut;

Adanya efisiensi pada kegiatan ini dengan menghapus Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.31.860.000,- pada refocusing perubahan APBD sehingga diharapkan sampai akhir tahun anggaran 2022 masih bisa dilaksanakan untuk belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dari Koordinasi dan Penyusunan dan Perubahan Dokumen RKA-SKPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, rencana biaya sebesar Rp 9.100.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 0%;

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 9.100.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 yang seluruh kegiatan belum dilaksanakan dan tidak adanya efisiensi pada perubahan anggaran 2022;

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, rencana biaya sebesar Rp.186.926.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.120.355.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 64,39% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp.66.571.000,-
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 66.571.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 dengan dihapusnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai sebesar Rp. 118.854.000,-;
4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, rencana biaya sebesar Rp 752.858.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 250.743.250,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 33,31% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp 502.114.750,-
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 502.114.750,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 dengan adanya efisiensi dikurangnya belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 36.110.000,-;
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, rencana biaya pada APBD sebesar Rp 1.550.800.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.772.172.776,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 49,79% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 778.627.224,-
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 778.627.224,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 yang sebagian kegiatan telah direalisasikan seperti Belanja Jasa Kantor untuk Honorarium dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransibagi Non ASN yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2022;
6. **Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**, rencana biaya sebesar Rp 531.597.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 42.819.500,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan

yaitu sebesar 8,05% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 488.777.500,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 488.777.500,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 dengan sebelumnya ada efisiensi untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan dalam Kota Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan sebesar Rp.59.173.000,- serta efisiensi Belanja Barang dan Jasa pada Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum sebesar Rp.15.086.000,- dan Fasilitas Penataan Wilayah sebesar Rp.51.644.000,;

7. **Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**, rencana biaya sebesar Rp424.167.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 71.840.250,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 16,94% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 352.326.750,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 352.326.750,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 dari efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Rp.17.940.000,- dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 34.893.000,-;

8. **Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah**, rencana biaya sebesar Rp 444.990.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir Juni Tahun 2022 sebesar Rp 223.536.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 50,23%; dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 221.454.000,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 221.454.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 dengan adanya efisiensi anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 30.010.000,-;

9. **Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual**, rencana biaya sebesar Rp 188.521.898.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12.690.960.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 6,73,% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 175.830.938,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 14.150.938.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 setelah adanya efisiensi Belanja Hibah

Pesantren sebesar Rp.161.680.000,- dengan rincian 4.042 Pondok Pesantren x Rp.40.000.000,- sesuai dengan arahan Gubernur Banten untuk dibatalkannya pemberian Hibah pada tahun 2022, serta efisiensi dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual sebesar Rp.62.272.000,- serta Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual sebesar Rp.216.250.000,-;

- 10. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar,** rencana biaya sebesar Rp 354.432.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 48.733.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 13,75%; dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 305.699.000,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp 305.699.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 setelah adanya efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan , Kesehatan dan Sosial sebesar Rp.55.568.000,-;

- 11. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar,** rencana biaya sebesar Rp 224.748.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.19.571.000,- dengan tingkat capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 8,71% dengan sisa anggaran semester I Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.205.177.000,-

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp.205.177.000,- yaitu sebesar sisa anggaran sampai semester I TA.2022 setelah adanya efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp.75.252.000,-

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perangkat Daerah disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan Keuangan Semester I (Triwulan II) Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian uraian Laporan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu semester tahun anggaran. Laporan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja SKPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.



PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SKPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2022

SATKER : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester I	Prognosis	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	42.934.541.931,00	7.623.082.016,00	35.311.459.915,00	35.311.459.915,00	17,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.298.061.750,00	3.023.082.016,00	17.274.979.734,00	17.274.979.734,00	14,89
5.1.05	Belanja Hibah	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
	JUMLAH BELANJA DAERAH	42.934.541.931,00	7.623.082.016,00	35.311.459.915,00	35.311.459.915,00	17,76
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76

SERANG, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si
NIP. 197410041994021002



PROVINSI BANTEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SKPD

SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

PER REKENING SUB RINCIAN OBYEK

TAHUN ANGGARAN 2022

SATKER : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester I	Prognosis	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	42.934.541.931,00	7.623.082.016,00	35.311.459.915,00	35.311.459.915,00	17,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.298.061.750,00	3.023.082.016,00	17.274.979.734,00	17.274.979.734,00	14,89
5.1.02.01	Belanja Barang	2.646.757.550,00	428.720.250,00	2.218.037.300,00	2.218.037.300,00	16,20
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.646.757.550,00	428.720.250,00	2.218.037.300,00	2.218.037.300,00	16,20
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	578.469.550,00	113.359.250,00	465.110.300,00	465.110.300,00	19,60
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.930.000,00	33.720.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00	71,85
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	113.903.000,00	1.653.000,00	112.250.000,00	112.250.000,00	1,45
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	31.180.000,00	6.898.000,00	24.282.000,00	24.282.000,00	22,12
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.250.000,00	26.460.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	45,42
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.305.000,00	0,00	19.305.000,00	19.305.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	978.920.000,00	79.840.000,00	899.080.000,00	899.080.000,00	8,16
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	418.400.000,00	0,00	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.100.000,00	78.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	98,38
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	40.050.000,00	39.400.000,00	650.000,00	650.000,00	98,38
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	144.100.000,00	0,00	144.100.000,00	144.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	46.000.000,00	41.580.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	90,39
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.677.281.200,00	1.071.108.766,00	6.606.172.434,00	6.606.172.434,00	13,95
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.899.310.000,00	1.056.740.000,00	5.842.570.000,00	5.842.570.000,00	15,32

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester I	Prognosis	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.712.100.000,00	40.150.000,00	1.671.950.000,00	1.671.950.000,00	2,35
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	230.120.000,00	1.540.000,00	228.580.000,00	228.580.000,00	0,67
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	7.200.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	18,18
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.305.850.000,00	698.950.000,00	606.900.000,00	606.900.000,00	53,52
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	26.600.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	53,85
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	33.250.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	53,85
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	609.770.000,00	0,00	609.770.000,00	609.770.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.539.500.000,00	37.500.000,00	2.502.000.000,00	2.502.000.000,00	1,48
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	11.550.000,00	16.170.000,00	16.170.000,00	41,67
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	100.063.200,00	14.368.766,00	85.694.434,00	85.694.434,00	14,36
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.000.000,00	10.868.976,00	82.131.024,00	82.131.024,00	11,69
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.139.200,00	1.554.440,00	1.584.760,00	1.584.760,00	49,52
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.924.000,00	1.945.350,00	1.978.650,00	1.978.650,00	49,58
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	334.122.000,00	0,00	334.122.000,00	334.122.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	103.362.000,00	0,00	103.362.000,00	103.362.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	97.560.000,00	0,00	97.560.000,00	97.560.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	268.786.000,00	0,00	268.786.000,00	268.786.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	72.786.000,00	0,00	72.786.000,00	72.786.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.224.023.000,00	360.753.000,00	5.863.270.000,00	5.863.270.000,00	5,80
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.224.023.000,00	360.753.000,00	5.863.270.000,00	5.863.270.000,00	5,80
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.310.623.000,00	83.865.500,00	1.226.757.500,00	1.226.757.500,00	6,40

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester I	Prognosis	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.098.902.000,00	248.567.500,00	1.850.334.500,00	1.850.334.500,00	11,84
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.987.398.000,00	28.320.000,00	1.959.078.000,00	1.959.078.000,00	1,42
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	827.100.000,00	0,00	827.100.000,00	827.100.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
	JUMLAH BELANJA DAERAH	42.934.541.931,00	7.623.082.016,00	35.311.459.915,00	35.311.459.915,00	17,76
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76

SERANG, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 197410041994021002



PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SKPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.851.940.000,00	1.199.491.516,00	2.652.448.484,00	2.652.448.484,00	31,14
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.940.000,00	15.460.000,00	156.480.000,00	156.480.000,00	8,99
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.740.000,00	0,00	90.740.000,00	90.740.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.740.000,00	0,00	90.740.000,00	90.740.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.740.000,00	0,00	90.740.000,00	90.740.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	21.583.000,00	0,00	21.583.000,00	21.583.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.583.000,00	0,00	21.583.000,00	21.583.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.283.000,00	0,00	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.057.000,00	0,00	51.057.000,00	51.057.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.057.000,00	0,00	51.057.000,00	51.057.000,00	0,00
4.01.01.1.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51.057.000,00	0,00	51.057.000,00	51.057.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.05.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	7.160.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	47,73
4.01.01.1.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	7.160.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	47,73
4.01.01.1.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.160.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	47,73
4.01.01.1.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	7.160.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	47,73
4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	7.160.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	47,73
4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	5.600.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	41,67
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.200.000,00	8.300.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	45,60
4.01.01.1.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.200.000,00	8.300.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	45,60
4.01.01.1.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	8.300.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	45,60
4.01.01.1.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
4.01.01.1.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	7.078.250,00	37.921.750,00	37.921.750,00	15,73
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	6.360.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	31,80
4.01.01.1.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	6.360.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	31,80
4.01.01.1.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	6.360.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	31,80
4.01.01.1.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	6.360.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	31,80
4.01.01.1.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	6.360.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	31,80
4.01.01.1.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	760.500,00	2.439.500,00	2.439.500,00	23,77
4.01.01.1.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	33,33
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36
4.01.01.1.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36
4.01.01.1.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36
4.01.01.1.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36
4.01.01.1.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	717.750,00	4.282.250,00	4.282.250,00	14,36
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
4.01.01.1.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555.000.000,00	186.240.000,00	368.760.000,00	368.760.000,00	33,56
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.700.000,00	0,00	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	114.669.000,00	0,00	114.669.000,00	114.669.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.669.000,00	0,00	114.669.000,00	114.669.000,00	0,00
4.01.01.1.05.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	114.669.000,00	0,00	114.669.000,00	114.669.000,00	0,00
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	325.000.000,00	186.240.000,00	138.760.000,00	138.760.000,00	57,30
4.01.01.1.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000,00	186.240.000,00	138.760.000,00	138.760.000,00	57,30
4.01.01.1.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	186.240.000,00	138.760.000,00	138.760.000,00	57,30
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	325.000.000,00	186.240.000,00	138.760.000,00	138.760.000,00	57,30
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	325.000.000,00	186.240.000,00	138.760.000,00	138.760.000,00	57,30
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.750.000,00	26.460.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	92,03

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.100.000,00	78.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	98,38
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	40.050.000,00	39.400.000,00	650.000,00	650.000,00	98,38
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	129.100.000,00	0,00	129.100.000,00	129.100.000,00	0,00
4.01.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	46.000.000,00	41.580.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	90,39
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	354.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.646.000,00	0,00	4.646.000,00	4.646.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.646.000,00	0,00	4.646.000,00	4.646.000,00	0,00
4.01.01.1.05.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.646.000,00	0,00	4.646.000,00	4.646.000,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.520.000.000,00	210.194.500,00	1.309.805.500,00	1.309.805.500,00	13,83
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	108.111.000,00	141.889.000,00	141.889.000,00	43,24
4.01.01.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	108.111.000,00	141.889.000,00	141.889.000,00	43,24
4.01.01.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	108.111.000,00	141.889.000,00	141.889.000,00	43,24
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000.000,00	108.111.000,00	141.889.000,00	141.889.000,00	43,24
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000.000,00	108.111.000,00	141.889.000,00	141.889.000,00	43,24
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83.970.000,00	61.823.000,00	22.147.000,00	22.147.000,00	73,63
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.450.000,00	32.890.000,00	560.000,00	560.000,00	98,33
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	112.250.000,00	0,00	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00
4.01.01.1.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.830.000,00	6.898.000,00	6.932.000,00	6.932.000,00	49,88
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	52.470.000,00	97.530.000,00	97.530.000,00	34,98
4.01.01.1.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	52.470.000,00	97.530.000,00	97.530.000,00	34,98
4.01.01.1.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	52.470.000,00	97.530.000,00	97.530.000,00	34,98
4.01.01.1.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	92.280.000,00	40.920.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	44,34
4.01.01.1.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.280.000,00	40.920.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	44,34

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.080.000,00	1.800.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	13,76
4.01.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.200.000,00	39.120.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	49,39
4.01.01.1.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.720.000,00	11.550.000,00	46.170.000,00	46.170.000,00	20,01
4.01.01.1.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.720.000,00	11.550.000,00	46.170.000,00	46.170.000,00	20,01
4.01.01.1.06.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.01.01.1.06.04.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.720.000,00	11.550.000,00	16.170.000,00	16.170.000,00	41,67
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	220.000.000,00	6.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	2,73
4.01.01.1.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	6.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	2,73
4.01.01.1.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	6.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	2,73
4.01.01.1.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	220.000.000,00	6.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	2,73
4.01.01.1.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	220.000.000,00	6.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	2,73
4.01.01.1.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	207.500.000,00	6.000.000,00	201.500.000,00	201.500.000,00	2,89
4.01.01.1.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000,00	43.613.500,00	856.386.500,00	856.386.500,00	4,85
4.01.01.1.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	43.613.500,00	856.386.500,00	856.386.500,00	4,85
4.01.01.1.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	43.613.500,00	856.386.500,00	856.386.500,00	4,85
4.01.01.1.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
4.01.01.1.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
4.01.01.1.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
4.01.01.1.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	898.736.000,00	43.613.500,00	855.122.500,00	855.122.500,00	4,85
4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	898.736.000,00	43.613.500,00	855.122.500,00	855.122.500,00	4,85
4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	624.936.000,00	12.023.500,00	612.912.500,00	612.912.500,00	1,92
4.01.01.1.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.800.000,00	31.590.000,00	242.210.000,00	242.210.000,00	11,54
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.560.000.000,00	780.518.766,00	779.481.234,00	779.481.234,00	50,03
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.560.000.000,00	780.518.766,00	779.481.234,00	779.481.234,00	50,03
4.01.01.1.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000.000,00	780.518.766,00	779.481.234,00	779.481.234,00	50,03
4.01.01.1.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000.000,00	780.518.766,00	779.481.234,00	779.481.234,00	50,03
4.01.01.1.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	17.736.800,00	7.350.000,00	10.386.800,00	10.386.800,00	41,44
4.01.01.1.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.736.800,00	7.350.000,00	10.386.800,00	10.386.800,00	41,44
4.01.01.1.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.736.800,00	7.350.000,00	10.386.800,00	10.386.800,00	41,44
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.542.263.200,00	773.168.766,00	769.094.434,00	769.094.434,00	50,13
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.442.200.000,00	758.800.000,00	683.400.000,00	683.400.000,00	52,61

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.305.850.000,00	698.950.000,00	606.900.000,00	606.900.000,00	53,52
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.400.000,00	26.600.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	53,85
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	61.750.000,00	33.250.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	53,85
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	100.063.200,00	14.368.766,00	85.694.434,00	85.694.434,00	14,36
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.000.000,00	10.868.976,00	82.131.024,00	82.131.024,00	11,69
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.139.200,00	1.554.440,00	1.584.760,00	1.584.760,00	49,52
4.01.01.1.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.924.000,00	1.945.350,00	1.978.650,00	1.978.650,00	49,58
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.300.000.000,00	553.188.000,00	2.746.812.000,00	2.746.812.000,00	16,76
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	700.000.000,00	115.817.000,00	584.183.000,00	584.183.000,00	16,55
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	150.000.000,00	13.033.500,00	136.966.500,00	136.966.500,00	8,69
4.01.03.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	13.033.500,00	136.966.500,00	136.966.500,00	8,69
4.01.03.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	13.033.500,00	136.966.500,00	136.966.500,00	8,69
4.01.03.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	19.714.000,00	0,00	19.714.000,00	19.714.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.714.000,00	0,00	19.714.000,00	19.714.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.114.000,00	0,00	10.114.000,00	10.114.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
4.01.03.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.986.000,00	13.033.500,00	86.952.500,00	86.952.500,00	13,04
4.01.03.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.986.000,00	13.033.500,00	86.952.500,00	86.952.500,00	13,04
4.01.03.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.702.000,00	2.546.500,00	40.155.500,00	40.155.500,00	5,96
4.01.03.1.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.284.000,00	10.487.000,00	46.797.000,00	46.797.000,00	18,31
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	100.000.000,00	18.949.000,00	81.051.000,00	81.051.000,00	18,95
4.01.03.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	18.949.000,00	81.051.000,00	81.051.000,00	18,95
4.01.03.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	18.949.000,00	81.051.000,00	81.051.000,00	18,95
4.01.03.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.886.000,00	5.690.000,00	6.196.000,00	6.196.000,00	47,87
4.01.03.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.886.000,00	5.690.000,00	6.196.000,00	6.196.000,00	47,87
4.01.03.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.086.000,00	3.090.000,00	996.000,00	996.000,00	75,62
4.01.03.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	33,33
4.01.03.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.400.000,00	7.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	17,77

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.03.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.400.000,00	7.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	17,77
4.01.03.1.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.900.000,00	7.000.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	37,04
4.01.03.1.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
4.01.03.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.714.000,00	6.259.000,00	42.455.000,00	42.455.000,00	12,85
4.01.03.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.714.000,00	6.259.000,00	42.455.000,00	42.455.000,00	12,85
4.01.03.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.580.000,00	1.530.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	10,49
4.01.03.1.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.134.000,00	4.729.000,00	29.405.000,00	29.405.000,00	13,85
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	450.000.000,00	83.834.500,00	366.165.500,00	366.165.500,00	18,63
4.01.03.1.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	83.834.500,00	366.165.500,00	366.165.500,00	18,63
4.01.03.1.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	83.834.500,00	366.165.500,00	366.165.500,00	18,63
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.263.000,00	1.741.000,00	10.522.000,00	10.522.000,00	14,20
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.263.000,00	1.741.000,00	10.522.000,00	10.522.000,00	14,20
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.223.000,00	1.741.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	27,98
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.300.000,00	9.800.000,00	81.500.000,00	81.500.000,00	10,73
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00	9.800.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	18,74
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	9.800.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	30,25
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.01.03.1.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	346.437.000,00	72.293.500,00	274.143.500,00	274.143.500,00	20,87
4.01.03.1.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	346.437.000,00	72.293.500,00	274.143.500,00	274.143.500,00	20,87
4.01.03.1.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185.765.000,00	26.741.000,00	159.024.000,00	159.024.000,00	14,40
4.01.03.1.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.712.000,00	17.232.500,00	58.479.500,00	58.479.500,00	22,76
4.01.03.1.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.960.000,00	28.320.000,00	56.640.000,00	56.640.000,00	33,33
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	900.000.000,00	211.483.000,00	688.517.000,00	688.517.000,00	23,50
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	250.000.000,00	21.290.500,00	228.709.500,00	228.709.500,00	8,52
4.01.03.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	21.290.500,00	228.709.500,00	228.709.500,00	8,52

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.03.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	21.290.500,00	228.709.500,00	228.709.500,00	8,52
4.01.03.1.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.832.000,00	3.150.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	65,19
4.01.03.1.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.832.000,00	3.150.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	65,19
4.01.03.1.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.832.000,00	1.150.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	40,61
4.01.03.1.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62
4.01.03.1.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62
4.01.03.1.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62
4.01.03.1.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	238.668.000,00	12.640.500,00	226.027.500,00	226.027.500,00	5,30
4.01.03.1.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	238.668.000,00	12.640.500,00	226.027.500,00	226.027.500,00	5,30
4.01.03.1.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.550.000,00	3.086.500,00	107.463.500,00	107.463.500,00	2,79
4.01.03.1.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.118.000,00	9.554.000,00	118.564.000,00	118.564.000,00	7,46
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	250.000.000,00	48.013.000,00	201.987.000,00	201.987.000,00	19,21
4.01.03.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	48.013.000,00	201.987.000,00	201.987.000,00	19,21
4.01.03.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	48.013.000,00	201.987.000,00	201.987.000,00	19,21
4.01.03.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	22.982.000,00	3.931.000,00	19.051.000,00	19.051.000,00	17,10
4.01.03.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.982.000,00	3.931.000,00	19.051.000,00	19.051.000,00	17,10
4.01.03.1.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.782.000,00	1.091.000,00	4.691.000,00	4.691.000,00	18,87
4.01.03.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.200.000,00	2.840.000,00	14.360.000,00	14.360.000,00	16,51
4.01.03.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.200.000,00	7.300.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	9,58
4.01.03.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.200.000,00	7.300.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	9,58
4.01.03.1.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	76.200.000,00	7.300.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	9,58
4.01.03.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.818.000,00	36.782.000,00	114.036.000,00	114.036.000,00	24,39
4.01.03.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.818.000,00	36.782.000,00	114.036.000,00	114.036.000,00	24,39
4.01.03.1.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.420.000,00	10.610.000,00	22.810.000,00	22.810.000,00	31,75
4.01.03.1.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.398.000,00	26.172.000,00	91.226.000,00	91.226.000,00	22,29
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	400.000.000,00	142.179.500,00	257.820.500,00	257.820.500,00	35,54
4.01.03.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	142.179.500,00	257.820.500,00	257.820.500,00	35,54
4.01.03.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	142.179.500,00	257.820.500,00	257.820.500,00	35,54
4.01.03.1.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	34.940.000,00	21.907.500,00	13.032.500,00	13.032.500,00	62,70
4.01.03.1.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.940.000,00	21.907.500,00	13.032.500,00	13.032.500,00	62,70
4.01.03.1.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.250.000,00	19.727.500,00	10.522.500,00	10.522.500,00	65,21

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.03.1.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	40,00
4.01.03.1.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	2.080.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	46,85
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.080.000,00	52.790.000,00	23.290.000,00	23.290.000,00	69,39
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.080.000,00	52.790.000,00	23.290.000,00	23.290.000,00	69,39
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.100.000,00	6.550.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	32,59
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	1.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	37,75
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	50,00
4.01.03.1.02.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	288.980.000,00	67.482.000,00	221.498.000,00	221.498.000,00	23,35
4.01.03.1.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	288.980.000,00	67.482.000,00	221.498.000,00	221.498.000,00	23,35
4.01.03.1.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.850.000,00	17.340.000,00	63.510.000,00	63.510.000,00	21,45
4.01.03.1.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.668.000,00	50.142.000,00	52.526.000,00	52.526.000,00	48,84
4.01.03.1.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.462.000,00	0,00	105.462.000,00	105.462.000,00	0,00
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.700.000.000,00	225.888.000,00	1.474.112.000,00	1.474.112.000,00	13,29
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.500.000.000,00	219.345.000,00	1.280.655.000,00	1.280.655.000,00	14,62
4.01.03.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	219.345.000,00	1.280.655.000,00	1.280.655.000,00	14,62
4.01.03.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	219.345.000,00	1.280.655.000,00	1.280.655.000,00	14,62
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	93.752.000,00	3.000.000,00	90.752.000,00	90.752.000,00	3,20
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.752.000,00	3.000.000,00	90.752.000,00	90.752.000,00	3,20
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.952.000,00	0,00	11.952.000,00	11.952.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	42,86
4.01.03.1.03.01.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	467.802.000,00	200.000.000,00	267.802.000,00	267.802.000,00	42,75
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	377.340.000,00	200.000.000,00	177.340.000,00	177.340.000,00	53,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	122.640.000,00	0,00	122.640.000,00	122.640.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	90.462.000,00	0,00	90.462.000,00	90.462.000,00	0,00
4.01.03.1.03.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90.462.000,00	0,00	90.462.000,00	90.462.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.03.1.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	938.446.000,00	16.345.000,00	922.101.000,00	922.101.000,00	1,74
4.01.03.1.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	938.446.000,00	16.345.000,00	922.101.000,00	922.101.000,00	1,74
4.01.03.1.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.082.000,00	9.988.000,00	43.094.000,00	43.094.000,00	18,82
4.01.03.1.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.264.000,00	6.357.000,00	51.907.000,00	51.907.000,00	10,91
4.01.03.1.03.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	827.100.000,00	0,00	827.100.000,00	827.100.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	100.000.000,00	6.543.000,00	93.457.000,00	93.457.000,00	6,54
4.01.03.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	6.543.000,00	93.457.000,00	93.457.000,00	6,54
4.01.03.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	6.543.000,00	93.457.000,00	93.457.000,00	6,54
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.602.000,00	2.893.000,00	5.709.000,00	5.709.000,00	33,63
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.602.000,00	2.893.000,00	5.709.000,00	5.709.000,00	33,63
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	709.000,00	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.398.000,00	3.650.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	12,85
4.01.03.1.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.398.000,00	3.650.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	12,85
4.01.03.1.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00
4.01.03.1.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.218.000,00	3.650.000,00	16.568.000,00	16.568.000,00	18,05
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.532.000,00	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.532.000,00	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.03.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	82.468.000,00	0,00	82.468.000,00	82.468.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.468.000,00	0,00	82.468.000,00	82.468.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00
4.01.03.1.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.198.000,00	0,00	64.198.000,00	64.198.000,00	0,00
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	35.782.601.931,00	5.870.402.500,00	29.912.199.431,00	29.912.199.431,00	16,41
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	34.632.601.931,00	5.808.914.000,00	28.823.687.931,00	28.823.687.931,00	16,77
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6.500.000.000,00	1.162.500.000,00	5.337.500.000,00	5.337.500.000,00	17,88
4.01.04.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000.000,00	1.162.500.000,00	5.337.500.000,00	5.337.500.000,00	17,88
4.01.04.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000.000,00	1.162.500.000,00	5.337.500.000,00	5.337.500.000,00	17,88
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	578.400.000,00	0,00	578.400.000,00	578.400.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	578.400.000,00	0,00	578.400.000,00	578.400.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.245.000,00	0,00	40.245.000,00	40.245.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.305.000,00	0,00	19.305.000,00	19.305.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	418.400.000,00	0,00	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.900.230.000,00	0,00	1.900.230.000,00	1.900.230.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.708.470.000,00	0,00	1.708.470.000,00	1.708.470.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	236.700.000,00	0,00	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	609.770.000,00	0,00	609.770.000,00	609.770.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	847.000.000,00	0,00	847.000.000,00	847.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	191.760.000,00	0,00	191.760.000,00	191.760.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	97.560.000,00	0,00	97.560.000,00	97.560.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	271.370.000,00	0,00	271.370.000,00	271.370.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	271.370.000,00	0,00	271.370.000,00	271.370.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.840.000,00	0,00	61.840.000,00	61.840.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.530.000,00	0,00	59.530.000,00	59.530.000,00	0,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.04.1.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
4.01.04.1.01.01.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.750.000.000,00	1.162.500.000,00	2.587.500.000,00	2.587.500.000,00	31,00
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	28.132.601.931,00	4.646.414.000,00	23.486.187.931,00	23.486.187.931,00	16,52
4.01.04.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.132.601.931,00	4.646.414.000,00	23.486.187.931,00	23.486.187.931,00	16,52
4.01.04.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.496.121.750,00	46.414.000,00	5.449.707.750,00	5.449.707.750,00	0,84
4.01.04.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	742.361.750,00	12.560.000,00	729.801.750,00	729.801.750,00	1,69
4.01.04.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	742.361.750,00	12.560.000,00	729.801.750,00	729.801.750,00	1,69
4.01.04.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98.201.750,00	0,00	98.201.750,00	98.201.750,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	644.160.000,00	12.560.000,00	631.600.000,00	631.600.000,00	1,95
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.701.800.000,00	4.000.000,00	2.697.800.000,00	2.697.800.000,00	0,15
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.505.800.000,00	4.000.000,00	2.501.800.000,00	2.501.800.000,00	0,16
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	832.800.000,00	4.000.000,00	828.800.000,00	828.800.000,00	0,48
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.625.000.000,00	0,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.051.960.000,00	29.854.000,00	2.022.106.000,00	2.022.106.000,00	1,45
4.01.04.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.051.960.000,00	29.854.000,00	2.022.106.000,00	2.022.106.000,00	1,45
4.01.04.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.548.000,00	0,00	66.548.000,00	66.548.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	785.412.000,00	29.854.000,00	755.558.000,00	755.558.000,00	3,80
4.01.04.1.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.01.04.1.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
4.01.04.1.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
4.01.04.1.01.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
4.01.04.1.01.02.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.636.480.181,00	4.600.000.000,00	18.036.480.181,00	18.036.480.181,00	20,32
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	650.000.000,00	37.968.500,00	612.031.500,00	612.031.500,00	5,84
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.04.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28
4.01.04.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28
4.01.04.1.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.044.000,00	791.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	6,06
4.01.04.1.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.044.000,00	791.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	6,06
4.01.04.1.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.044.000,00	511.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	25,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	280.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	2,55
4.01.04.1.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	66.396.000,00	0,00	66.396.000,00	66.396.000,00	0,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.796.000,00	0,00	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	20.796.000,00	0,00	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00
4.01.04.1.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.560.000,00	11.760.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	9,75
4.01.04.1.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.560.000,00	11.760.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	9,75
4.01.04.1.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.560.000,00	11.760.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	16,67
4.01.04.1.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28
4.01.04.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28
4.01.04.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	12.551.000,00	187.449.000,00	187.449.000,00	6,28
4.01.04.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	13.044.000,00	791.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	6,06
4.01.04.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.044.000,00	791.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	6,06
4.01.04.1.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.044.000,00	511.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	25,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	280.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	2,55
4.01.04.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	66.396.000,00	0,00	66.396.000,00	66.396.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.796.000,00	0,00	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	20.796.000,00	0,00	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00
4.01.04.1.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.560.000,00	11.760.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	9,75
4.01.04.1.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.560.000,00	11.760.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	9,75
4.01.04.1.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.560.000,00	11.760.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	16,67
4.01.04.1.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	250.000.000,00	12.866.500,00	237.133.500,00	237.133.500,00	5,15
4.01.04.1.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	12.866.500,00	237.133.500,00	237.133.500,00	5,15
4.01.04.1.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	12.866.500,00	237.133.500,00	237.133.500,00	5,15
4.01.04.1.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	16.986.000,00	1.106.500,00	15.879.500,00	15.879.500,00	6,51
4.01.04.1.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.986.000,00	1.106.500,00	15.879.500,00	15.879.500,00	6,51
4.01.04.1.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.306.000,00	826.500,00	2.479.500,00	2.479.500,00	25,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.680.000,00	280.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	2,05
4.01.04.1.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	88.194.000,00	0,00	88.194.000,00	88.194.000,00	0,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	31.194.000,00	0,00	31.194.000,00	31.194.000,00	0,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	31.194.000,00	0,00	31.194.000,00	31.194.000,00	0,00
4.01.04.1.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.820.000,00	11.760.000,00	133.060.000,00	133.060.000,00	8,12
4.01.04.1.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.820.000,00	11.760.000,00	133.060.000,00	133.060.000,00	8,12
4.01.04.1.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.320.000,00	11.760.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00	14,29
4.01.04.1.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	500.000.000,00	23.520.000,00	476.480.000,00	476.480.000,00	4,70
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000,00	5.880.000,00	194.120.000,00	194.120.000,00	2,94
4.01.04.1.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	5.880.000,00	194.120.000,00	194.120.000,00	2,94
4.01.04.1.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	5.880.000,00	194.120.000,00	194.120.000,00	2,94
4.01.04.1.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.400.000,00	5.880.000,00	73.520.000,00	73.520.000,00	7,41
4.01.04.1.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.400.000,00	5.880.000,00	73.520.000,00	73.520.000,00	7,41
4.01.04.1.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.400.000,00	5.880.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	20,00
4.01.04.1.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	103.400.000,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
4.01.04.1.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	100.000.000,00	17.640.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00	17,64
4.01.04.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	17.640.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00	17,64
4.01.04.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	17.640.000,00	82.360.000,00	82.360.000,00	17,64
4.01.04.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.100.000,00	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.100.000,00	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.100.000,00	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.030.000,00	17.640.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	32,65
4.01.04.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.030.000,00	17.640.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	32,65
4.01.04.1.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.280.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00	50,00
4.01.04.1.03.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	42.934.541.931,00	7.623.082.016,00	35.311.459.915,00	35.311.459.915,00	17,76

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN s/d. SEMESTER I	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(42.934.541.931,00)	(7.623.082.016,00)	(35.311.459.915,00)	(35.311.459.915,00)	17,76

SERANG, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

NIP. 197410041994021002

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Kepala Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat**

Gunawan Rusminto, AP, M.Si

NIP.19741004 199402 1 002

Kabag. Pemerintahan

Drs. H. Nanang Irawan, M.Si

NIP.19740211 199402 1 002

Kabag. Otonomi Daerah

Drs. Gusnedi, AP

NIP.19740820 199311 1 002

Kabag. Kesejahteraan Rakyat

H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si., ME

NIP.19721103 200112 1 002

**Kasubag. Administrasi Pemerintahan dan
Fasilitas Penataan Wilayah**

Andi Juianto, S.STP., M.Si

NIP.19820712 200112 1 004

**Kasubag. Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD**

Nuraisah, S.IP, M.Si

NIP.19770816 200112 1 004

Kasubag. Bina Mental dan Spiritual

Saepudin, S.Ag., MM

NIP.19701118 200112 1 005

**Kasubag. Pemerintahan Umum dan
Kerjasama**

Ratih Anggraini, S.IP, M.Si

NIP.19880505 200701 2 001

**Kasubag. Pengembangan
Otonomi Daerah**

Erni Yuliana, S.Sos

NIP.197907 200112 2 002

Kasubag. Kesra Non Pelayanan Dasar

Lufki Solihin, SD, MH

NIP.19750201 200112 1 005

Plt. Kasubag. Tata Usaha

Ade Irmawan, SH, MH

NIP.19820830 201101 1 003

**Kasubag. Evaluasi dan
Penyelenggaraan Pemerintah**

Ade Ifan Ansori, S.STP., M.Si

NIP.19820713 200112 1 003

Kasubag. Kesra Pelayanan Dasar

H.Tb.A.Faisal Abbas, S.Ag, M.Si

NIP.19760801 200112 1004

193,041,816,000.00
20,160,770,750.00
172,881,045,250.00
0.90



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2022

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19741004 199402 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Kinerja SKPD
7. Daftar Inventaris Aset Tetap dan Penyusutan
8. Daftar Inventaris Persediaan barang
9. Daftar Aset tak Berwujud dan Amortisasi
10. Rekap / Register SP2D
11. Rekap STS
12. Copy STS
13. SPJ Fungsional
14. Surat Pertanggung Jawaban Pengguna Anggaran

Laporan per 31 Desember 2022, Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas. Posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Serang, Januari 2023

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Banten



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

NIP.19741004 199402 1 002